

BEBERAPA TINDAKAN HAMENGGKUBUWANA I (1755-1792 M)

DALAM TINJAUAN DOKTRIN KEAGUNGBINATARAAN



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

Moh Nor Salim

00120365

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

Riswinarno S.S.

Dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Moh Nor Salim

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Kepada

Dekan Fakultas Adab

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya selesai membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara:

nama : Moh Nor Salim

NIM : 00120365

judul : *Beberapa Tindakan Hamengkubuwana I (1755-1792 M)
Dalam Tinjauan Doktrin Keagunbinataran*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saya berharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2005 M

Pembimbing



Riswinarno S.S

NIP: 150294782



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**BEBERAPA TINDAKAN HAMENGKUBUWANA I (1755-1792 M)
DALAM TINJAUAN DOKTRIN KEAGUNGBINATARAAN**

Diajukan oleh :

1. Nama : **MOH NOR SALIM**
2. NIM : 00120365
3. Program : Sarjana Strata 1
4. Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Telah dimunaqasyahkan pada hari: **Senin** tanggal **25 Juli 2005** dengan nilai **B+** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., M.A.
NIP. 150290391

Sekretaris Sidang

Dra. Soraya Adnani, M.Si.
NIP. 150264719

Pembimbing /merangkap penguji,

Riswinarno, SS.
NIP. 150294782

Penguji I

Dra. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
NIP. 150221922

Penguji II,

Imam Muhsin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289451



Yogyakarta, 28 Juli 2005

Dekan,
Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150178235

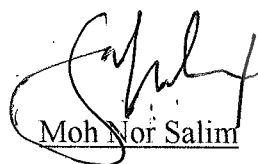
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa di dalam skripsi saya yang berjudul *Beberapa Tindakan Hamengkubuwana I (1755-1792 M) Dalam Tinjauan Doktrin Keagungbinataraan* tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Jika pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atau dicabut gelar dan hak kesarjanaan saya di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2005


Moh Nor Salim

NIM: 00120365

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hanya kepada Allah SWT,
penyusun *pantas* mengalah dan menyerah,
maka perjuangan untuk hidup dan kehidupan harus terus dilanjutkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

1. almamater penyusun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. *Emak* penyusun, Sulasni, dan *Pak Ji* Samsul Hadi (*alm.*),
3. Ibu penyusun, Masyati (*alm.*), dan Bapak Hasbi (*alm.*),
4. Kakak-kakak penyusun yaitu Yayuk Nur Sholikhah, Titik Ulfatin Khoiriyah, Hanik Rosyidah, dan Siti Masyrufatin,
5. Mbak Umi dan Mas Suswanto beserta ketiga buah hatinya yaitu Yulizar, Afik dan Luna,
6. Kak Said dan Mbak Niamah,
7. Rara.¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Nama dari suara yang selalu menemani kesendirian dan kesunyian hari-hariku. Rara seperti *Camelia* milik Ebit G. Ade dan *Alina* milik Seno Gumira A.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى

اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Skripsi berjudul *Beberapa Tindakan Hamengkubuwana I (1755-1792 M)*

Dalam Tinjauan Doktrin Keagungbinataraan disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama menyusun skripsi ini, penyusun mendapat banyak bantuan baik dorongan atau pun perdebatan dalam diskusi yang sangat membantu mempertajam analisis masalah. Untuk itu, penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. M. Syakir Ali, MA, selaku Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama skripsi ini, sebelum keberangkatannya ke Jakarta,
3. Riswinarno, SS, selaku dosen pembimbing kedua skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar,
4. Mas Bambang MBK, Yoana, Hery, dan kawan-kawan di AJI yang telah meminjamkan sekretariat AJI dan memberikan banyak fasilitas yang menunjang penyelesaian skripsi ini.
5. kawan-kawanku di Majalah ARENA; Belek, Zainal, Tamam, Yuyun, Faris, Nihaya, Suraji, Budi, Opix, Sinyo, Utun, Dani, Udin, Edwin,

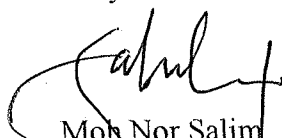
dll. Pengalaman saya berproses dan belajar di ARENA adalah anugrah yang begitu besar dan tidak akan terlupakan.

6. Je Es, Maftuh, Andi Tahmid, Samson, Endi, Ulil, Edo, dan kawan-kawan di Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KeMPeD) basis FPPI DIY. Warna hidup yang kujalani sekarang ini, sebagian adalah goresan kalian.
7. Kak Rudin, Mas Dim, Mbak Ida, si kecil Nabil, Mas Gareng, Suwung, Roni, Tarno, Umi, Bono, Ema, Saiful, Mudhofar, Frend, Rahman, Didin, Zainal, Cipinx, Wawang, Faishol, Yoyok, dan Kanca. Kalian semua adalah yang membuatku merasa *ada* dan *mengada* sebagai manusia ketika *harus* kembali ke rumah kita.
8. serta semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu demi satu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih menyimpan banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena kemampuan penyusun yang sangat terbatas. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian sejarah di Indonesia dan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Juli 2005 M

Penyusun


Moh Nor Salim
00120365



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : DOKTRIN KEAGUNGBINATARAAN DAN SEJARAH

BERDIRINYA KASULTANAN YOGYAKARTA

A. <i>Manunggaling Kawula-Gusti</i> dan Doktrin Keagungbinataraan	15
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Doktrin Keagungbinataraan oleh Raja-Raja Mataram	19
C. Pengaruh Belanda di Kerajaan Mataram	25
D. Pemberontakan Mangkubumi dan Berdirinya Kasultanan Yogyakarta...29	

BAB III : BEBERAPA TINDAKAN HAMENGGKUBUWANA I

A. Pembangunan Keraton	34
B. Pengaturan Wilayah Kekuasaan	38
C. Penyusunan Pejabat-Pejabat Kasultanan	40
D. Penyikapan Terhadap Pembagian Kerajaan Mataram	43
E. Menjalinkan Hubungan Dengan Belanda	47

BAB IV : ARTI BEBERAPA TINDAKAN HAMENGGKUBUWANA I
MENURUT DOKTRIN KEAGUNGBINATARAAN

A. Upaya Pengabsahan Kekuasaan	52
B. Upaya Pembinaan Doktrin Keagunghbinataraan	57
C. Upaya Mengurangi Campur Tangan Belanda	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa pada umumnya dipandang sama dengan sejarah raja-raja. Pandangan ini muncul karena kekuasaan raja yang begitu kuat di tingkat tertinggi dalam tatanan kemasyarakatan dan mengakar dalam kebudayaan masyarakat.¹

Orang Jawa memandang alam adalah susunan dari dua unsur yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dianggap sebagai perwujudan mikrokosmos, dunia manusia yang mampu melakukan komunikasi dan mempunyai hubungan dengan makrokosmos, dunia para dewa. Pandangan ini mengandung dua faktor penting. *Pertama*, terdapat kesejajaran antara mikrokosmos dengan makrokosmos, dan *kedua*, pengaruh timbal balik antara mikrokosmos dan makrokosmos.²

Di kerajaan-kerajaan Jawa-Hindu karena mikrokosmos disejajarkan dengan makrokosmos, maka kekuasaan raja dianggap sama dengan kekuasaan dewa, biasanya Wisnu. Namun pada masa kerajaan-kerajaan Jawa-Islam, seperti Mataram Islam, kesejajaran antara mikrokosmos dan makrokosmos

¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabottingi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. 1, 1981), hlm. 22.

² Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 1, 1985), hlm. 32.

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menganggap kedudukan raja sebagai *kalifatullah*, Wakil Tuhan di dunia.³

Peniadaan kedudukan yang sama antara mikrokosmos dan makrokosmos pada masa kerajaan Jawa-Islam tidak mengurangi substansi kekuasaan raja yang menyeluruh dan multak atas segala sesuatu yang ada di wilayah kekuasaannya. Kedudukan raja sebagai pemegang kekuasaan politik, agama, dan militer tercermin dalam gelar-gelar yang dipakainya. Begitu besarnya kekuasaan raja dikatakan *wenang wisesa ing sanagari*. Raja adalah *kinarya wakiling Hyang Agung* yang bertugas memelihara tegaknya hukum dan keadilan. Semua orang wajib taat kepadanya karena siapa yang berani menentang perintah raja itu berarti *mbandel ing karsaning Hyang Agung*.⁴

Kerajaan Mataram, sejak didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575 M, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, memerintah tahun 1613-1645 M. Pada waktu itu, wilayah kekuasaan Mataram meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Namun pada masa pemerintahan raja-raja yang menggantikannya tampak adanya kemunduran. Wilayah kekuasaan Mataram makin menyempit karena diambil alih Belanda sebagai imbalan campur tangan Belanda dalam menyelesaikan pertentangan-pertentangan di Kerajaan Mataram.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴ G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, (Yogyakarta: Kanisius, cet. 1, 1987), hlm. 77-82.

⁵ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV, Indonesia dalam Abad 18 dan 19*, ed. F.A. Sutjipto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. 1, 1975), hlm. 1.

Bukan hanya mengambil alih wilayah-wilayah kekuasaan Mataram, Belanda juga mengikat Mataram dengan berbagai perjanjian. Perjanjian itu bukan hanya perjanjian dagang namun juga perjanjian politik. Adanya perjanjian politik ini telah mengakibatkan adanya keterikatan hubungan politik antara Belanda dengan Mataram. Ironisnya, perjanjian ini tidak hanya berlaku selama satu periode kekuasaan tetapi akan terus diperbarui setiap kali seorang putra mahkota akan menduduki takhta kerajaan. Puncak dari perjanjian ini adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Mataram dari Pakubuwana II kepada Belanda pada tahun 1746 M.⁶

Belanda meskipun memiliki kekuasaan dan pengaruh lewat perjanjian-perjanjian tersebut, tetapi tetap mempertahankan raja di *kursi* kekuasaannya dan memanfaatkan posisi raja untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan politiknya.⁷ Adanya campur tangan Belanda di kerajaan dan semakin banyaknya wilayah-wilayah Mataram yang diambil alih Belanda menjadi salah satu sebab terjadinya pemberontakan Mangkubumi yang dibantu Mas Said melawan Belanda tahun 1746-1755 M. Pemberontakan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 M, yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada bulan Maret 1757 M, Belanda membagi Kasunanan Surakarta menjadi Mangkunegaran dengan perjanjian Salatiga.⁸

⁶ Darnosugito, *Sejarah Kota Jogjakarta* dalam buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun Sub Panitia Penerbitan, 1956), hlm. 7-10.

⁷ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial*, hlm. 22

⁸ Darnosugito, *Sejarah Kota Jogjakarta*, hlm. 12.

Terjadinya pembagian ini menguntungkan Belanda karena menghentikan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said.

Sejarah Mangkubumi menjadi Hamengkubuwana I adalah sejarah seorang raja yang unik dan tidak pernah terjadi pada masa Kerajaan Mataram. Hamengkubuwana I hanyalah putra Amangkurat IV yang lahir dari istri selir bernama Sumarsa dengan nama kecil Raden Mas Sudjono pada tanggal 5 Agustus 1717 M dan setelah dewasa dia mendapatkan gelar Gusti Pangeran Hario Mangkubumi dari Pakubuwana II. Tahun 1746 M, ketika umurnya sekitar dua puluh sembilan tahun, Mangkubumi berhasil mengalahkan pemberontakan Mas Said dan Martapura sehingga berhak mendapatkan hadiah 3.000 cacah di Sukawati. Hadiah ini dibatalkan Pakubuwana II karena ditentang oleh Patih Pringgalaya dan Belanda. Mangkubumi akhirnya meninggalkan keraton Surakarta dan melakukan pemberontakan melawan Belanda sampai tahun 1755 M.⁹

Pada masa awal kekuasaannya, Hamengkubuwana I telah memiliki sebuah kerajaan dengan setengah wilayah Mataram dan beberapa pejabat kerajaan namun belum memiliki keraton sebagai pusat kerajaan.¹⁰ Maka pada awal kekuasaannya, Hamengkubuwana I segera membangun keraton Yogyakarta. Sedangkan sistem pemerintahan yang dijalankan Hamengkubuwana I tidak berbeda dengan sistem pemerintahan yang

⁹ *Ibid.*, hlm.8.

¹⁰ M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, terj. Hartono Hadikusumo dan E. Setiyawati Alkhatab, (Yogyakarta: Mata Bangsa, cet. 1, 2002), hlm.123.

dilaksanakan di Kerajaan Mataram¹¹ dan sama-sama memiliki dua unsur yang penting yaitu sebuah jaringan kerja yang terdiri dari sejumlah pejabat kerajaan dan sistem pembagian wilayah kekuasaan.¹²

Tindakan Hamengkubuwana I juga dipengaruhi oleh adanya perjanjian Giyanti yang mengharuskan dirinya untuk membangun hubungan baik dengan Belanda dan memberikan bantuan kepada Pakubuwana III sewaktu-waktu diperlukan.¹³ Pasca terjadinya pembagian Mataram, Belanda terus memainkan perannya untuk mencegah kembali bersatunya Kerajaan Mataram. Belanda menjembatani Hamengkubuwana I, Pakubuwana III, dan Mangkunegara guna melakukan politik diplomasi dan menjadi penengah terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali melalui peperangan.¹⁴

Membina hubungan baik dan saling memberi bantuan inilah yang menjadi persoalan yang sulit bagi raja yang menjalankan doktrin keagungbinataran. Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan Mangkunegara sama-sama menganggap dirinya sebagai raja yang agung dan binatara serta harus terus membina keagungbinataran kekuasaannya. Bila Hamengkubuwana I membina hubungan baik dengan keduanya dan Belanda berarti telah membalik hubungan yang dahulunya sebagai lawan berubah menjadi kawan. Hamengkubuwana I pada masa awal kekuasaannya telah mencoba

¹¹ Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870* terj. E. Setiyawati Alkhatab, (Yogyakarta: Bentang Budaya, cet. 1, 2002), hlm 17.

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³ Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1985), hlm. 4-5.

¹⁴ M.C. Ricklefs, *Yogyakarta*, hlm. 655.

mengembalikan keagungbinataran kekuasaan Mataram yang tidak utuh lagi akibat pembagian kerajaan. Keagungbinataran kekuasaan Mataram hanya bisa dikembalikan ketika hanya ada satu kerajaan yang berkuasa atas semua wilayah kekuasaan Mataram.¹⁵

Sosok Hamengkubuwana I, yang memerintah Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755-1792 M, paling mendapat sorotan dalam catatan-catatan Belanda. Nicolaas Hartingh, Gubernur Pantai Laut Timur Belanda di Semarang (1754-1761 M), dalam catatan yang dibuat untuk penggantinya yang bernama van Ossenbergh, dituliskan bahwa Hamengkubuwana I adalah raja yang mempunyai sopan santun dan cerdas serta pandai berpura-pura dihadapan Belanda. Hamengkubuwana I banyak menghabiskan uang untuk meninggikan dan memperbesar kekuasaannya. Setelah menjadi Gubernur Pantai Laut Timur Belanda, van Ossenbergh (1761-1765 M) dalam catatannya juga membenarkan apa yang dinyatakan Hartingh dan mengakui bahwa Hamengkubuwana I adalah raja yang lebih pintar dari Pakubuwana II dan III tetapi bersikap tidak baik dan tidak penurut terhadap Belanda.¹⁶

Dari dua catatan tersebut tampak bahwa Hamengkubuwana I adalah seorang raja yang dapat memposisikan dirinya sebagai seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda dan *mantan* pejuang melawan Belanda. Sikap ini dilakukan agar Belanda tidak banyak mencampuri kekuasaannya. Usaha Hamengkubuwana I untuk mempertautkan kepentingan kerajaan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 657.

¹⁶ Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*, (Jakarta: Mahabarata, 1952), hlm. 28-33.

dengan kepentingan Belanda menjadikan dirinya sebagai Sultan yang dihormati sekaligus ditakuti oleh Belanda.¹⁷

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji beberapa tindakan Hamengkubuwana I sejak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Yogyakarta tanggal 13 Februari 1755 M sampai meninggal pada 24 Maret 1792 M dalam tinjauan doktrin keagungbinataran. Doktrin keagungbinataran adalah nama konsep kekuasaan Jawa yang digunakan oleh Moedjanto untuk melihat kekuasaan raja-raja Mataram yang mutlak atau absolut.¹⁸ Berdasar latar belakang di atas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. tindakan apa saja yang dilakukan oleh Hamengkubuwana I untuk membina keagungbinataran kekuasaannya,
2. bagaimana pola hubungan yang dijalin oleh Hamengkubuwana I terhadap Belanda kaitannya dengan doktrin keagungbinataran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hamengkubuwana I dalam rangka membina keagungbinataran kekuasaannya,
2. membandingkan hubungan Hamengkubuwana I dengan Belanda sebelum dan setelah menjadi Sultan di Yogyakarta.

¹⁷ *Ibid*, hlm.35.

¹⁸ G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, hlm. 100.

Selain tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini, penyusun juga berharap tulisan ini mempunyai manfaat praktis maupun ilmiah dalam jangka pendek ataupun dalam waktu-waktu yang akan datang. Minimal penelitian ini diharapkan mampu memunculkan wacana baru terhadap penelitian Kasultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkubuwana I.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran literatur yang telah dilakukan, kajian tentang tema tindakan-tindakan Hamengkubuwana I selama menjadi Sultan di Kasultanan Yogyakarta masih kurang. Bahkan buku-buku yang diharapkan menjadi buku utama skripsi masih berupa buku-buku berbahasa Jawa dan Belanda serta hanya sedikit yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.¹⁹ Begitupun dengan penelitian yang berupa skripsi mahasiswa, sepengetahuan penyusun, belum ada.

Salah satu literatur yang mengulas beberapa tindakan Hamengkubuwana I adalah buku *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792* karya M.C. Ricklefs yang banyak menceritakan sejarah pembagian Mataram dan dinamika pertikaian yang terjadi antara Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran serta posisi Belanda dalam pertikaian itu. Menurut penyusun, Ricklefs dalam bukunya tidak terlalu menonjolkan peran Belanda sebagai bagian penentu terjadinya pembagian Kerajaan Mataram.

¹⁹ Buku-buku berbahasa Jawa yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah *Babad Giyanti*, *Babad Mataram*, dan *Serat Surya Radja*, sedangkan buku berbahasa Belanda yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diantaranya *De Oorkonden van het Nederlandsch Gezag over Java*, karya de Jonge, dan *Mangkubumi Ngajogjakarto's eerste Sultan*, karya C. Poensen.

Sebaliknya dia lebih menekankan bahwa pembagian Mataram adalah akibat konflik *elite* yang terjadi antara pangeran-pangeran Kerajaan Mataram dan menempatkan Belanda di luar lingkaran konflik yang mencoba memfasilitasi agar konflik *elite* tersebut tidak menjadi perang saudara yang berlarut-larut dan menyengsarakan rakyat.

Buku Ricklefs yang telah menetralkan posisi dan peran Belanda sangat berbeda dengan sudut pandang yang dipakai oleh peneliti Indonesia seperti Selo Soemardjan dalam bukunya *Perubahan Sosial di Yogyakarta* dan Darmosugito dalam tulisannya yang berjudul *Sejarah Kota Jogjakarta* dalam buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*. Selo Sumandjan dan Darmosugito memandang bahwa Belanda adalah sumber konflik dan tokoh utama dalam perjanjian Giyanti. Namun buku karya Selo Sumardjan ditinjau dari pendekatan yang digunakan bukanlah buku Sejarah tetapi buku Sosiologi, sedangkan tulisan Darmosugito hanya mendeskripsikan latar belakang sejarah berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan perkembangan awal kekuasaannya dibawah pemerintahan Hamengkubuwana I.

Literatur dalam bahasa Jawa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah *Babad Nilik Ngayogya* yang penulisnya memakai nama *Orang di Ngayogyakarta*. Babad ini mendeskripsikan tentang kondisi Kasultanan Yogyakarta pada masa kekuasaan Hamengkubuwana I. Babad ini ditulis pada masa Hamengkubuwana II berkuasa sehingga cerita-cerita sejarah yang ditulis dalam babad ini bukan saja hanya berpusat di keraton tetapi juga telah menokohkan putra mahkota Hamengkubuwana I.

Buku yang dipakai membahas tentang doktrin keagungbinataran kekuasaan raja-raja Mataram yaitu *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram* karya Moedjanto. Namun dibandingkan dengan buku Moedjanto, skripsi ini ingin membatasi kajian kepada beberapa tindakan Hamengkubuwana I ketika menjadi Sultan di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792 M menurut doktrin keagungbinataran.

E. Landasan Teori

Orang Jawa memandang kekuasaan raja-raja yang ada di dunia ini terdiri dari empat unsur.²⁰ Empat unsur itu yang *pertama* adalah kekuasaan itu nyata, sehingga tidak bersifat teori melainkan suatu realitas yang benar-benar ada. Kekuasaan merupakan daya yang tidak bisa diraih, penuh misteri, dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Unsur *kedua* adalah kekuasaan itu homogen sehingga sifat kekuasaan hanya satu, baik jenis maupun sumbernya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja sama sifatnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh raja yang lain. Unsur *ketiga* adalah jumlah kekuasaan di alam semesta tetap karena alam tidak bertambah luas dan tidak bertambah sempit. Unsur *keempat* kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan. Manusia yang ingin mendapatkan kekuasaan dan menjadikan kekuasaan itu absah maka harus melakukan pemusatan kekuasaan dan terus menerus membina kekuasaannya.

²⁰ Fachry Ali, *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 24-26.

Tentang model kekuasaan Mataram telah diteliti oleh Moedjanto dalam bukunya *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram* yang mengemukakan salah satu konsepnya yaitu doktrin keagungbinataraan. Doktrin keagungbinataraan memandang kekuasaan itu sebagai suatu ketunggalan artinya kekuasaan itu harus utuh dan menyeluruh, tidak boleh ada yang menyaingi, tidak terkotak-kotak atau terbagi-bagi serta tidak hanya mengenai bidang-bidang tertentu. Kekuasaan raja seperti kekuasaan Dewa, yang agung dan binatara.²¹

Ada tiga alasan mengapa penerapan doktrin keagungbinataraan menjadi penting bagi raja-raja Mataram.²² *Pertama*, raja-raja Mataram adalah keturunan petani. Berdirinya Kerajaan Mataram telah mengubah sistem pemerintahan yang awalnya *patrimonial* (bersifat kebabakan) menjadi *monarkal* (kerajaan). *Kedua*, tidak adanya hukum adat pewarisan takhta raja-raja Mataram yang dapat menjamin keamanan kedudukan putra mahkota. *Ketiga*, banyaknya raja-raja Mataram yang mendapatkan kekuasaannya dengan melakukan penggeseran terhadap putra mahkota yang sah.

Ketiga alasan inilah yang menjadikan raja-raja Mataram selalu merasa dirinya terancam oleh pusat-pusat kekuasaan lain. Raja Mataram yang baru berkuasa selalu berusaha mengabsahkan diri dan kekuasaannya agar bisa diterima dan diakui oleh pejabat kerajaan dan rakyatnya. Pengabsahan ini sangat penting sebagai jaminan dan perlindungan terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Selain keabsahan kekuasaan, penting pula bagi raja-raja Mataram

²¹ G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*, hlm. 77-100.

²² *Ibid.*, hlm. 83-91.

untuk berusaha secara terus-menerus membina keagungbinataran kekuasaannya dengan berbagai cara, seperti memakai gelar-gelar, membuat silsilah, menerapkan pemakaian bahasa ngoko-krama Jawa, kepemilikan pusaka, meluaskan wilayah kekuasaannya, dan menggantungkan kekuasaannya kepada perlindungan serta bantuan Belanda.²³

Situasi Mataram setelah terjadinya perjanjian Giyanti adalah situasi yang memaksa raja-raja pecahan Mataram tidak bisa lagi menerapkan doktrin keagungbinataran secara penuh. Ketiga penguasa Jawa saat itu meskipun menganggap dirinya yang paling pantas menjadi raja, dalam kenyataannya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pembagian kerajaan ini. Sebaliknya, dukungan dan campur tangan Belanda yang membuat ketiganya tetap bisa bertahan di *kursi* kekuasaannya.²⁴

Pada masa awal kekuasaannya, Hamengkubuwana I telah mencoba menyatukan Kerajaan Mataram dengan cara melakukan pernikahan politis dengan putri Pakubuwana III meskipun akhirnya gagal. Usaha-usaha ini menunjukkan bahwa Hamengkubuwana I adalah seorang raja yang mempunyai ambisi besar untuk mengembalikan keagungbinataran kekuasaan raja-raja Mataram di bawah pemerintahannya. Hamengkubuwana I juga sering membuat kebijakan yang membuat takut Belanda serta selalu berusaha meningkatkan kebesaran kekuasaannya dengan berbagai macam cara seperti membangun keraton, benteng, dan Taman Sari.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm 25-40.

²⁴ M.C. Ricklefs, *Yogyakarta*, hlm. 575.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 576.

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang beberapa tindakan Hamengkubuwana I dalam tinjauan doktrin keagungbinataraan ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*), dan penulisan sejarah (*historiografi*).¹

Pada tahap *pertama*, *heuristik*, penyusun mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian melalui buku-buku yang sesuai dengan objek kajian dan pembahasan ini. Pada tahap *kedua* yaitu *verifikasi*, penyusun melakukan penelitian terhadap keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik *ekstern* dan kebenaran sumber yang ditelusuri melalui kritik *intern*.²

Tahap *ketiga*, *interpretasi*, dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah, kemudian disusun menjadi fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Setelah itu penelitian memasuki tahap terakhir yaitu *historiografi* yang menggunakan metode *deskriptif-analisis* berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan dalam rencana skripsi.³

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Di bab *pertama* penyusun memberikan uraian yang terkait dengan latar belakang masalah penelitian, kemudian membatasi dan merumuskan masalah, menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, dan memaparkan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan pembatasan dan

¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 54

² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 58.

³ *Ibid.*, hlm. 104.

perumusan yang telah ditentukan, penyusun memberikan landasan teori sebagai pisau analisa penelitian ini dan menguraikan metode penelitian yang digunakan serta membuat sistematika pembahasan skripsi.

Selanjutnya di bab *kedua* penyusun menguraikan *setting teori* dan *setting historis* sehingga memberikan alur yang lebih jelas dan terarah terhadap skripsi ini. Penyusun memandang penting untuk terlebih dahulu menjelaskan pandangan orang Jawa terhadap kekuasaan yang tercermin dalam *konsep manunggaling kawula-gusti*, sebagai pijakan untuk memahami doktrin keagungbinataran yang diterapkan oleh raja-raja Mataram Islam. Selain itu, penyusun memberikan gambaran tentang pengaruh Belanda di Kerajaan Mataram yang telah mencampuri kebijakan-kebijakan raja-raja Mataram dan mempengaruhi otoritas raja-raja Mataram dalam melaksanakan doktrin keagungbinataran serta proses berdirinya Kasultanan Yogyakarta.

Setelah *setting teori* dan *setting historis* skripsi sudah jelas maka di bab *ketiga* penyusun mendeskripsikan beberapa tindakan Hamengkubuwana I yang meliputi pembangunan keraton, pengaturan wilayah kekuasaan, penyusunan pejabat-pejabat Kasultanan Yogyakarta, penyikapan terhadap pembagian Kerajaan Mataram dan membina hubungan dengan Belanda. Bab *ketiga* ini selanjutnya dianalisa dengan teori yang telah dipaparkan dalam Bab *kedua* dan menjadi bab *keempat*. Hasilnya, penyusun menarik kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan di Bab *keempat* dan dideskripsikan di bab *kelima*. Selain menarik kesimpulan penyusun juga memberikan saran-saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak Hamengkubuwana I menandatangani perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, dia menyadari bahwa kedudukannya sebagai Sultan dibatasi oleh berbagai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hamengkubuwana I telah melakukan beberapa tindakan untuk mengabsahkan kekuasaan yang dimilikinya, membina serta berusaha mengembalikan keagungbinataran kekuasaan Mataram yang telah runtuh akibat adanya berbagai perjanjian politik dengan Belanda. Selain itu, Hamengkubuwana I melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi campur tangan Belanda di kekuasaannya.

Di wilayah kekuasaannya, menurut penyusun, Hamengkubuwana I adalah raja yang agung dan binatara yang selalu berusaha mengurangi campur tangan Belanda, sedangkan di luar wilayah kekuasaannya Hamengkubuwana I meskipun telah berusaha untuk selalu menunjukkan kebesaran dan keagungan kekuasaannya, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa melepaskan diri dari hegemoni Belanda untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terjadi. Doktrin keagungbinataran di satu sisi telah mengukung Hamengkubuwana I untuk tidak bisa secara langsung berperan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara dirinya dengan Pakubuwana III dan Mangkunegara. Kehadiran Belanda telah menghalangi cara-cara raja Jawa untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan jalan peperangan. Pada

situasi dan kondisi seperti itulah Belanda menempatkan dirinya menjadi fasilitator dan *broker* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara raja-raja pecahan Mataram.

Hubungan persekutuan yang dijalin Hamengkubuwana I dengan Belanda bukan sekedar hubungan persekutuan tapi lebih tepatnya hubungan persekutuan yang saling menguntungkan. Hamengkubuwana I memiliki kekuasaan pada wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Belanda dibiarkan memiliki keagungbinataran pada wilayah kekuasaan Belanda.

Ini adalah salah satu cara Hamengkubuwana I menjalankan kekuasaannya berdasar doktrin keagungbinataran kekuasaan raja-raja Mataram yang telah dipertahankan sampai ajal menjemputnya. Cara seperti ini, dalam sejarah raja-raja Mataram pengganti Sultan Agung, belum pernah dan tidak akan pernah bisa dilakukan, karena roda sejarah tidak mungkin ditarik ke belakang.

B. Saran

Penyusun mempunyai dua saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. *Pertama* penelitian tentang kekuasaan raja-raja Islam di Indonesia menjadi menarik apabila mampu mendeskripsikan akar pemahaman konsep kekuasaan dalam pandangan orang Jawa, baik yang dipengaruhi oleh ajaran Islam ataupun Hindu. *Kedua*, banyaknya sumber-sumber Belanda yang menjadi referensi ketika mengkaji Kerajaan Mataram Islam, maka penting bagi peneliti untuk memiliki kesadaran sejarah yang berperspektif nasionalisme,

sehingga penelitian yang dihasilkan tidak hanya menjadi pelengkap sejarah Belanda di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Darmosugito, *Sejarah Kota Yogyakarta* dalam buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun*, Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun Sub Panitia Penerbitan, 1956.

Djoko Suryo, *Konsep Manunggaling Kawula-Gusti dalam Pandangan Budaya Jawa Dulu dan Sekarang* dalam makalah yang disampaikan dalam seminar bulanan Lembaga Javanologi pada tanggal 27 Januari 1995.

Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.

Fachry Ali, *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Houben, Vincent J.H. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870* terj. E. Setiyawati Alkhatab, Yogyakarta: Benteng Budaya, cet. 1, 2002.

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia, cet. VI, 1996.

Margana, S., *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2004.

Maskuri dan Sutrisno Kutoyo (ed), *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976/1977.

Moedjanto, G., *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius, cet. 1, 1987.

Moh Ali, R., *Perjuangan Feodal*, Bandung: Ganaco, cet. 2, 1963.

Orang di Ngayogyakarta, *Babad Nitik Ngayogya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, cet. 1, 1981.

Rommelink, Willem G.J., *Babak Pertama Pemerintahan Pakubuwana II, 1725-1733: Menurut Sumber Babad dan Sumber VOC*, Yogyakarta: Proyek Javanologi dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. 1, 1983.

Ricklef, M.C., *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, terj. Hartono Hadikusumo dan E. Setiyawati Alkhatab, Yogyakarta: Mata Bangsa, cet. 1, 2002.

Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia IV, Indonesia dalam Abad 18 dan 19*, ed. F.A. Sutjipto, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. 1, 1975.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabottingi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. 1, 1981.

Soedarisman Poerwokoesoemo, Mr., KPH, *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1985.

Soemardjo Nitinegoro, R.M., *Sejarah Berdirinya Kota Kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: 1982.

Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 1, 1985.

Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*, Jakarta: Mahabarata, 1952.

Yudodiprojo, *Berdiri dan Artinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA